PEMERINTAH
KABUPATEN
GROBOGAN

RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jl. A.Yani no 118 Purwodadi Grobogan

RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA – OPD)
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026. Renja OPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Landasan hukum penyusunan Renja – OPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 adalah Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026.

Renja OPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 memuat Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah serta Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai Tugas pokok fungsi OPD, serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Disamping itu Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021 – 2026.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dijelaskan bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan.

Sedangkan fungsinya yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
b. Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
e. Pengelolaan kesekretariatan dinas;
f. UPTD; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan fungsinya.

Adapun Urusan yang menjadi kewenangan OPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan mengacu kepada Klasifikasi

UrusanPemerintahan Daerah dan Organisasi sebagaimana tertuang dalam lampiran A.I Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah :

1. Urusan Pertanian
2. Urusan Kelautan dan Perikanan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Capaian kinerja untuk masing – masing Program dan Kegiatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No		Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**460.000.000**	**447.672.800**	**97,32**
	A	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	460.000.000	447.672.800	97,32
	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	75.000.000	65.609.550	87,48
	2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	385.000.000	382.063.250	99,24
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**1.040.000.000**	**1.023.081.195**	**98,37**
	A	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	680.000.000	677.322.000	99,60
	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	680.000.000	677.322.000	99,60
	B	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	360.000.000	355.759.195	98,82
	1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	291.810.000	288.091.595	98,72
	2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	68.190.000	67.667.600	99,23
3	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**270.000.000**	**264.994.820**	**99,25**
	A	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	270.000.000	264.994.820	99,25
	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	220.000.000	218.014.820	99,09

	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.980.000	99,96
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**7.714.038.600**	**7.356.262.084**	**95,36**
	A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.791.500	143.428.000	90,89
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	142.791.500	139.288.000	97,54
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	4.140.000	27,60
	B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.107.243.000	3.924.699.485	95,55
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.013.674.000	3.851.036.485	95,95
	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	93.569.000	83.663.000	89,41
	C	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.030.000	90.886.000	98,76
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	92.030.000	90.886.000	98,76
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	-
	D	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.552.993.300	1.452.701.130	93,54
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	104.570.000	104.570.000	100
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	296.806.000	227.718.500	76,72
	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	152.130.300	149.973.300	98,58
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.500.000	11.400.000	91,20
	5	Penyediaan Bahan/Material	196.287.000	194.702.080	99,19
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	790.700.000	764.337.250	96,66
	E	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.073.000	238.495.000	95,37
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.073.000	238.495.000	95,37
	F	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.400.000	541.871.790	93,68
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.300.000	13.250.000	76,59
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000	155.448.040	86,38
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	381.100.000	373.173.750	97,92
	G	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	975.507.800	964.180.679	98,84

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218.840.000	218.206.679	99,71
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.000.000	155.172.000	99,47
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.667.800	590.802.000	98,36
5	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**8.862.476.700**	**8.712.878.700**	**98,31**
	A	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	246.000.000	229.564.000	93,31
	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	246.000.000	229.564.000	93,31
	B	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	73.426.700	72.511.700	98,75
	1	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	73.426.700	72.511.700	98,75
	C	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	8.543.050.000	8.410.803.000	98,45
	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	8.373.050.000	8.254.251.500	98,58
	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	170.000.000	156.551.500	92,09
6	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**687.665.000**	**677.059.250**	**98,46**
	A	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	687.665.000	677.059.250	98,46
	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	362.665.000	360.609.000	99,43
	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	225.000.000	220.250.500	97,89
	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	100.000.000	96.200.000	96,20
7	**PROGRAM PENGENDALIAN**		**665.000.150**	**619.521.935**	**93,16**

	KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
	A	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	219.999.950	217.135.550	98,70
	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	219.999.950	217.135.550	98,70
	B	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	-
	1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	0	0	-
	C	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	265.000.200	227.760.385	85,95
	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	265.000.200	227.760.385	85,95
	D	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	180.000.000	174.626.000	97,01
	1	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	150.000.000	144.958.000	98,64
	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	30.000.000	29.668.000	98,89
8	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**		**159.179.700**	**66.843.000**	**41,99**
	A	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	159.179.700	66.843.000	41,99
	1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	159.179.700	66.843.000	41,99
8	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**67.499.850**	**64.377.000**	**95,37**
	A	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	67.499.850	64.377.000	95,37
	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	7.500.000	7.500.000	100
	2	Pembentukan Badan Usaha Milik	59.999.850	56.877.000	94,79

		Petani			
		JUMLAH	**19.925.860.000**	**19.232.690.784**	**96,52**

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Peternakan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026, antara lain :

Penyelenggaraan urusan pertanian yaitu :

1. Kurangnya modal petani peternak dan petani nelayan untuk mengembangkan usahanya.
2. Tingkat pendidikan petani pada umumnya masih rendah sehingga memerlukan pembinaan.
3. Menurunnya daya dukung lingkungan.
4. Penerapan teknologi kurang sempurna karena keterbatasan dana dan ketrampilan Sumber Daya Manusia.
5. Faktor cuaca yaitu terjadinya kekeringan di musim kemarau dan banjir pada musim penghujan.
6. Kesulitan dalam pemasaran produksi hasil perikanan.

Solusi permasalahan penyelenggaraan urusan pertanian dan Kelautan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Bantuan penguatan modal melalui bantuan hibah ternak, sarana prasarana dll
2. Kursus / studi lapang / magang kelompok
3. Pembinaan yang lebih intensif terhadap kelompok tani nelayan maupun UPR – UPR yang ada
4. Memasyarakatkan Gemar makan ikan (Gemarikan)

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi peternakan
2. Meningkatkan produksi perikanan

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan maka sasaran Jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi peternakan
2. Meningkatnya produksi perikanan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan pada Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahun ketiga dari Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pendanaan indikatifnya adalah sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	APBD
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	APBD
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	APBD
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah	APBD

		(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	APBD
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	APBD
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	APBD
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	APBD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	APBD
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	APBD

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	APBD
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	APBD
			Penyediaan Bahan/Material	APBD
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	APBD
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	APBD

		Kabupaten/Kota		
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	APBD
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	APBD
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	APBD
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	APBD
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	APBD
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	APBD
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	APBD
		Pengawasan	Penilaian Risiko Penyakit	APBD

		Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Hewan dan Keamanan Produk Hewan	
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	APBD
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	APBD
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	APBD
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	APBD
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	APBD
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	APBD

V. PENUTUP

Renja – OPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan yang tercermin dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan

Demikian diharapkan dokumen ini berfungsi sebagai acuan segenap jajaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026 untuk Tahun Anggaran 2023.

Purwodadi, 10 Maret 2022
Kepala Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Grobogan

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

drh. RIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630510 198903 1 008

Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan

Demikian diharapkan dokumen ini berfungsi sebagai acuan segenap jajaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026 untuk Tahun Anggaran 2023.

Purwodadi, 5 Januari 2022

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Grobogan,

Drh. RIYANTO, MM.

NIP. 19630510 198903 1 008

Scanned with CamScanner